



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2026 TRIWULAN I



STASIUN PPMHKP BANDA ACEH

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP) Banda Aceh tahun 2026 triwulan I telah selesai disusun. Laporan ini untuk menyajikan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta berdasarkan perkembangan indikator yang ada.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Aceh Besar, 27 April 2026

Plh. Kepala

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Marine and Fisheries (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). The stamp contains the text 'STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH'. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Silvia Wijaya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
i Daftar Isi	ii
ii Daftar Tabel.....	iii
iii Daftar Gambar.....	iv
iv Ringkasan Eksekutif.....	v
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Arah Kebijakan Isu Strategis.....	4
1.3 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi Misi	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	8
3.2 Anggaran	58
3.3 Sumber Daya Manusia.....	59
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Rekomendasi	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi IK 1 Tahun 2026 Triwulan I	15
Tabel 2 Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Kegiatan Sektor Produksi Primer Pada Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026	15
Tabel 3 Target dan Realisasi IK 2 Tahun 2026 Triwulan I	20
Tabel 4 Data Kegiatan Surveilans Tahun 2026	20
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3 Tahun 2026 Triwulan I	25
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4 Tahun 2026 Triwulan I	29
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5 Tahun 2026 Triwulan I	33
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2026 Triwulan I	35
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7 Tahun 2026 Triwulan I	38
Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8 Tahun 2026 Triwulan I	41
Tabel 11 Target dan Realisasi Realisasi IK 9 Tahun 2026 Triwulan I	45
Tabel 12 Target dan Realisasi IK 10 Tahun 2026 Triwulan I	48
Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11 Tahun 2026 Triwulan I	52
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12 Tahun 2026 Triwulan I	56
Tabel 15 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2026	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2026	3
Gambar 2. Sasaran Strategis Tahun 2026	7
Gambar 3. Sasaran Kinerja Tahun 2026 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2026	9
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2026 Triwulan I	10
Gambar 5 <i>Capture</i> Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2026 Triwulan I	11
Gambar 6 Rangkaian Kegiatan Sektor Produksi Primer Tahun 2026	17
Gambar 7 Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi SKP Tahun 2026	23
Gambar 8 Pelaksanaan Kegiatan Supervisi / Verifikasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026 di Stasiun PPMHKP Banda Aceh	30
Gambar 9 <i>Capture</i> Aplikasi Sidak KKP Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 Triwulan I	40
Gambar 10 Tangkap Layar Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Sampai Dengan Tahun 2026 Triwulan I	51
Gambar 11 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 Triwulan I	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2026. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 sebagian besar telah memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 triwulan I adalah sebesar 112,67 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki sebagian besar telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir. Nilai NKO tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh sampai akhir tahun 2026 triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan target sebesar 72 % sampai dengan akhir tahun 2026 triwulan I telah sebesar tercapai 70 % (persentase capaian setara dengan 97,22 %).
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan target sebesar 72 % sampai dengan akhir tahun 2026 triwulan I telah tercapai sebesar 76,85 % (persentase capaian setara dengan 106,74 %).
 - c. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan target sebesar 71 % sampai dengan akhir tahun 2026 triwulan I belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode semester.

2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar” dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan target sebesar 71 %, pada akhir tahun 2026 triwulan I tercapai persentase sebesar 85,07 (persentase capaian setara dengan 119,82 %).
3. Pencapaian sasaran strategis “Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target tahunan sebesar 82,50, pada triwulan I tahun 2026 belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode semester.
 - b. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target tahunan senilai 77 pada akhir triwulan I tahun 2026 belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode tahunan.
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target tahunan senilai 86,20, pada akhir triwulan I tahun 2026 belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode tahunan.
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target sebesar 86, pada akhir triwulan I tahun 2026 tercapai sebesar 100 % (persentase capaian setara dengan 116,28 %).
 - e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target tahunan sebesar 92,10, pada akhir triwulan I tahun 2026 belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode tahunan.
 - f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, pada akhir triwulan I tahun 2026 belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode tahunan.
 - g. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target sebesar 77 % pada akhir triwulan I tahun 2026 tercapai sebesar 100 % (persentase capaian setara dengan 120 %)
 - h. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, dengan target nilai indeks sebesar 3,50 pada akhir triwulan I tahun 2026 tercapai sebesar 3,93 (persentase capaian setara dengan 112,29 %)

Realisasi anggaran Stasiun PPMHKP Banda Aceh sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 sebesar Rp 1.195.941.435,- atau setara dengan 99,44 % dari alokasi anggaran pagu revisi sebesar Rp. 4.787.744.000,-. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap aktivitas, kebijakan, serta hasil akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban setiap instansi pemerintah untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan asas akuntabilitas tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini memuat capaian kinerja utama, realisasi target, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya laporan kinerja yang akuntabel, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang serta sebagai alat untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-based management*). Oleh karena itu, penguatan asas akuntabilitas melalui pelaporan kinerja yang transparan dan akurat merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Stasiun PPMHKP merupakan Unit Pelaksana Teknis di yang mendukung visi dan misi serta tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) di wilayah Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Stasiun BPPMHKP Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun BPPMHKP Banda Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun BPPMHKP Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2026 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2026 Stasiun PPMHKP Banda Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi Stasiun PPMHKP Banda Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1. sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2026



1.2. Arah Kebijakan Isu Strategis

Dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan mandat kepada BPPMHKP untuk fokus dalam mendukung pada 2 arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

A. Memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap melalui:

- 1) menjamin mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);
- 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasardomestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
- 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; dan
- 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir.

B. Memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya untuk mencapai keberhasilan pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan melalui:

- 1) menjamin mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);
- 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
- 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
- 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.

1.3 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Stasiun PPMHKP Aceh sampai akhir tahun 2026 triwulan I. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Stasiun PPMHKP Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Stasiun PPMHKP Banda Aceh merujuk pada visi BPPMHKP yaitu "Menjadi otoritas kompeten pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang berdaulat, inovatif, dan diakui global untuk mewujudkan produk perikanan Indonesia yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan."

Dalam mendukung pelaksanaan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, BPPMHKP menetapkan misi sebagai berikut:

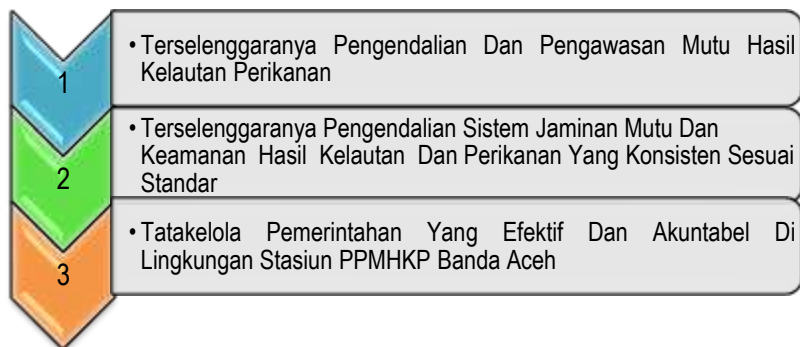
1. Memperkuat jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir. Misi ini mendukung Misi KKP ke-1 dengan memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya melalui pengawasan mutu produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang sesuai standar nasional dan internasional, berbasis risiko, dan terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui sistem pengendalian mutu yang modern, kredibel, dan diakui secara global. Misi ini mendukung Misi KKP ke-2, terutama dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemenuhan standar mutu, sertifikasi, harmonisasi standar dan fasilitasi akses pasar ekspor.
3. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha untuk kemandirian dan terciptanya budaya mutu pada pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan dan pengakuan system jaminan mutu untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha. Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, Lembaga penelitian, asosiasi, organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnya untuk sinergi dalam penguatan system jaminan mutu hasil perikanan.
4. Membangun organisasi yang profesional dan berintegritas dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pengendalian mutu, termasuk auditor, analis laboratorium, dan inspektur pengawasan serta didukung oleh sarana prasarana laboratorium dan operasional yang memadai.

Misi ini mendukung Misi KKP ke-3, khususnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang handal untuk menjawab kebutuhan industri dan tuntutan standar global.

5. Mewujudkan tata kelola pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang transparan, digital, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi nasional maupun internasional

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator kinerja yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Banda Aceh dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh guna mendukung kinerja BPPMHKP.

Gambar 2. Sasaran Strategis Tahun 2026



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK

stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Akuntabilitas kinerja organisasi BPPMHKP merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkup eselon I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BPPMHKP, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

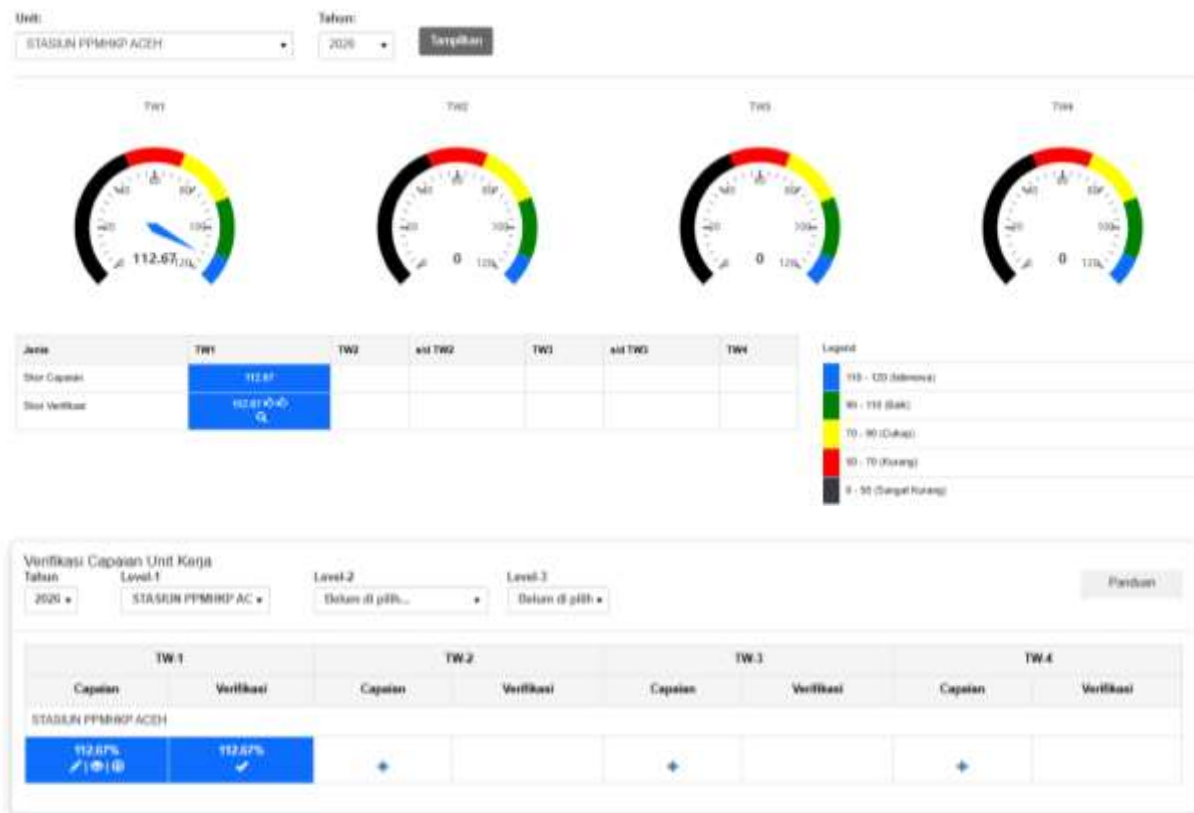
Gambar 3. Sasaran Kinerja Tahun 2026 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2026



No	Kode	Sasaran	Sasaran Atasan	Status	Aksi
1	SK 01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	Digunakan	
2	SK 02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	Digunakan	
3	SK 03	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan	Digunakan	

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2026)

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2026 Triwulan I



(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2026)

Sampai periode akhir tahun 2026 triwulan I, unit kerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO) Maret sebesar 112,67 %. Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terpotret melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 12 indikator kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5 Capture Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2026 Triwulan I

NIK0 Maret - 2026 Download

Unit Kerja : STASIUN PPMHKP ACEH

Skor Kinerja : **112.67**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silakan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung➕

Kode	Sesaran/Indikator Kinerja	Setian	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target sid Maret	Capaian sid Maret	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						101.98			101.98		
IK 1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produk Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72.00	72.00	70.00	97.22	72.00	70.00	97.22	16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72.00	72.00	70.00	106.74	72.00	70.00	106.74	16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.00	0.00			0.00	0.00		16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
SK.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar						119.02			119.02		
IK 4	Persentase Implementasi Metode Tertandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dituapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.00	71.00	85.07	119.82	71.00	85.07	119.82	16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
SK.03	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh						116.29			116.29		
IK 5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82.50	0.00			0.00	0.00		16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77.00	0.00			0.00	0.00		16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 7	Nilai Pelatihan Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86.28	0.00			0.00	0.00		16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Data Dukung1 Data Dukung2	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86.00	86.00	100.00	116.28	86.00	100.00	116.28	16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92.10	0.00			0.00	0.00		16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71.75	0.00			0.00	0.00		16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77.00	77.00	100.00	120.00	77.00	100.00	120.00	16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											
IK 12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3.50	3.50	3.93	112.29	3.50	3.93	112.29	16-Apr-2026 04:23
	Tambah Data Dukung➕											

Simpan

(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2026)

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. IK 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT. Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

1. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

3. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan

4. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan

5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat

6. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Pada tahun 2026 triwulan I telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh, Telah dilaksanakan koordinasi baik pusat maupun instansi terkait, serta menugaskan pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas pegawai secara *daring* guna mendukung kegiatan pendampingan kepada nelayan untuk menjamin mutu ikan hasil tangkapan dan menjamin mutu hasil perikanan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Bekerja sama dengan BPPMHKP dan DJPT KKP dalam bentuk *Training of Trainer (TOT)* terkait Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu.

Tabel 1 Target dan Realisasi IK 1 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	-	-	-	-	100	-	72	70	97,22	72	97,22	72	97,22

1. Capaian Indikator Kinerja

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT BPPMHKP (salah satunya Stasiun PPMHKP Banda Aceh) Tahun 2026 Perhitungannya Dilaksanakan Oleh Pusat Mutu Produksi Primer dengan indikator-indikator yang telah ditentukan untuk mengetahui tingkat efektifitas sertifikasi kegiatan primer.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Nomor B.299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 Tanggal 15 April 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan diperoleh rekap nilai sebagai berikut :

Tabel 2 Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Kegiatan Sektor Produksi Primer Pada Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026

UPT	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB - CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00 (Cukup Efektif)	70,00	97,22 %

Perhitungan setiap unsur dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator yang telah ditentukan sehingga diperoleh bobot atau nilai. Pada periode tahun 2026 triwulan I, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 adalah sebesar 70 % dari target triwulan I sebesar 72 %, atau setara dengan 97,22 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data pada aplikasi kinerjajaku, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2025 triwulan I tidak dilakukan perhitungan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra adalah sama, sebesar 97,22 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian triwulan I sebesar 70 % menunjukkan tingkat efektifitas dalam kategori cukup efektif. Pada periode ini tidak ada permohonan sertifikasi kegiatan primer yang masuk dari pengguna jasa. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada kegiatan sertifikasi primer adalah tidak terpenuhinya persyaratan terkait ijin PKKPRL sesuai KBLI. Upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Banda Aceh dalam upaya mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi, update data dan informasi, serta referensi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Diperlukan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dan koordinasi dengan stakeholder terkait dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS serta partisipasi penyuluh perikanan. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan Sektor Produksi Primer.

Gambar 6 Rangkaian Kegiatan Sektor Produksi Primer Tahun 2026



6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2026 didukung oleh pagu anggaran kegiatan Validasi Sertifikasi Produksi Primer dengan pagu anggaran terbaru sebesar Rp. 35.973.000,- dan sampai dengan bulan Maret terdapat realisasi sebesar Rp.10.559.060,- atau setara dengan persentase 29,35 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini dengan melaksanakan inspeksi, surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan, sosialisasi peraturan terkait kepada pengguna jasa, melaksanakan program yang telah direncanakan, koordinasi dengan Pusat Produksi Primer, koordinasi internal, koordinasi dengan *stakeholder* terkait, koordinasi dengan penyuluh perikanan serta unit pelaksana teknis eselon I terkait.

2. IK 2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilans, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir wajib memperhatikan persyaratan dan KBLI yang sesuai dengan Peraturan terbaru.

Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$\% X = \frac{A+B+C}{xn} X 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

1. Capaian Indikator Utama

Tabel 3 Target dan Realisasi IK 2 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	-	-	-	106,66	100	-	72	76,85	106,74	72	106,74	72	106,74

Tabel 4 Data Kegiatan Surveilans Tahun 2026

No	Nama /NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /J/PT	No. Surat Hasil Surveilans	Tgl Surveilans /Perbaikan /Terbit	Masa Berlaku	Ketidaksihutan				Status Perbaikan			Status Surat	Ruang Lingkup / Grade /No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
						Kritis	Serius	Mayor	Minor	Memuaskan	Tidak	Suspend			
1	FISHENARY INDO MAKMUR CV /61.481.979.5-101.001 /Jl. Sisingamangaraja Ujung No. 14, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia /085290778890 /-	Aceh /Stasiun KIPM Aceh	1/41.0/5KV/02/26	20 JAN 2026 /20 FEB 2026 /23 FEB 2026	23 FEB 2026 s.d 23 JUN 2026	0	0	2	3	5	0	0	BERLAKU	Fresh Demersal Fish / B / 279/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Fresh Pelagic Fish / B / 233/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Fresh Tuna / B / 234/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Frozen Cephalopods / B / 280/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Frozen Demersal Fish / B / 281/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Frozen Pelagic Fish / B / 235/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Frozen Shrimp / B / 282/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
														Frozen Tuna / B / 238/PM/HACCP/PS/03/25	BERLAKU
2	YAKIN PASIFIK TUNA, PT /82.281.005.7-101.000 /Komp. PPS Lampulo, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia /052-6511 80522290 /052-6511 80522290	Aceh /Stasiun PPMHKP Aceh	2/41.0/5KV/03/26	13 FEB 2026 /13 MAR 2026 /14 MAR 2026	14 MAR 2026 s.d 14 JUL 2026	0	0	5	3	7	1	0	BERLAKU	Frozen Demersal Fish / B / 374/PM/HACCP/PS/09/25	BERLAKU
														Frozen Pelagic Fish / B / 055/PM/HACCP/PS/11/24	BERLAKU
														Frozen Tuna / B / 375/PM/HACCP/PS/09/25	BERLAKU

Padatahun 2026 dilaksanakan kegiatan sosialisasi sertifikat kelayakan produksi (SKP) kepada penggiat usaha dan tim kerja bina mutu DKP Provinsi Aceh yang bertempat di ruang rapat rumah ikan higienis Aceh, kelurahan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan domisili penggiat usaha produk perikanan yang berada di Kota Banda Aceh, Rabu 11 Maret 2026. Kegiatan sosialisasi ini tentang SKP terkait dasar hukum, persyaratan dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi SKP. Melalui sosialisasi ini diharapkan penggiat usaha dapat memahami dengan mudah terkait proses sertifikasi SKP.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 Dilaksanakan Perhitungan Oleh Pusat Mutu Pascapanen.

Melalui Surat Nomor B. 450/BPMHKP.4/RC.610/IV/2026 Tanggal 16 April 2026, Perihal Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen. Nilai tersebut dipergunakan oleh UPT BPPMHKP untuk Mengetahui Data Persentase Indikator Kinerja Terkait. Berikut Rincian Data Tersebut :

UPT	Target (%)	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00 %	77,78 %	77,78 %	75,00 %	76,85 %

$$\% X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100 \%$$

$$\% X = \frac{77,78+77,78+75,00}{3} \times 100\%$$

$$\% X = 76,85 \%$$

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pascapanen yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 76,85 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh lebih kecil dibandingkan tahun 2025 triwulan I sebesar 100 %. Hal ini karena pada tahun 2026 dipergunakan perhitungan rumus jumlah permohonan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra 2025 – 2029 sama besarnya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2026. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan koordinasi internal dan eksternal.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi secara digital.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh pada kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen dengan pagu anggaran terbaru sebesar 69.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.286.500,- atau sekitar 4,72 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku

HACCP dan SKP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* dengan pihak UPI. Berikut dokumentasi kegiatan sektor produksi pasca panen tahun 2026.

Gambar 7 Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi SKP Tahun 2026



3. IK 3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan *supplier/miniplant*, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya..

Berdasarkan dokumen kinerja tahun 2026 pada indikator kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dipergunakan perhitungan periode semester dan mempergunakan rumus dan di bawah ini :

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Pada tahun 2026 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan “Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan lokasi pelaksanaan di 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh dengan lokus PPS Kutaradja dan Pasar Seutui. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester.

Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	71	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja pada periode sebelumnya menggunakan satuan lokasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan periode tahun 2026. Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerja pada tahun 2025 menggunakan pendekatan jumlah lokasi pengawasan mutu. Jika dibandingkan dengan data tahun 2025 kegiatan dilaksanakan di 1 lokasi kabupaten/kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh yang terdapat pada dokumen Renstra belum dapat dilakukan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan yaitu Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Stasiun PPMHKP Banda Aceh berusaha dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil fungsional umum dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 didukung dengan pagu anggaran apada kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik dengan pagu sebesar Rp. 3.560.000,-.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

4. IK 4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan mempunyai 3 unsur penting yaitu pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji, penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dan nilai kualitas penerapan *Quality Management System* (QMS) yang diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi.

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase, berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Stasiun PPMHKP Banda Aceh sebagai salah satu UPT BPPMHKP telah terakreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO:IEC 17025:2017. Status akreditasi bagi laboratorium bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja, hal ini berdampak pada pelayanan terhadap pengguna jasa layanan.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;

3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumberdaya
6. Persyaratan Proses;

Pada tahun 2026 indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dilakukan dengan periode triwulanan dengan sumber data dari Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP. Berikut formula perhitungan indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh :

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 BPPMHKP diamanahkan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Persyaratan Sistem Manajemen Stasiun PPMHKP Banda Aceh sebagai salah satu UPT BPPMHKP telah terakreditasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020IS dan SNI ISO/IEC 17025. Status akreditasi bagi unit kerja bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja, hal ini berdampak pada pelayanan terhadap pengguna jasa layanan.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	-	-	-	-	-	-	71	85,07	119,82	71	119,82	71	119,82

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2026 dilaksanakan kegiatan Supervisi / Verifikasi penerapan SMMI Lembaga Inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012 dan Lembaga Pengujian Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2027 serta Verifikasi *Quality Management System* (QMS) dan *Official Control* (OC) terkait Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di unit kerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP pada bulan Maret 2026. Dari hasil kegiatan supervise atau verifikasi tersebut diperoleh nilai yang menjadi data perhitungan indikator kinerja ini.

Berdasarkan surat dari Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP Nomor B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026 Tanggal 9 April 2026, perihal Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026, dan Laporan Temuan QMS diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

Stasiun PPMHKP menjadi salah satu UPT yang dilakukan penilaian secara langsung oleh Pusat Manajemen Mutu

- A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020 = 84,20
- B = Presentase Penerapan ISO 17025 = 81,50
- C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) = 89,52

$$X = \frac{84,20+81,50+89,52}{3} \times 100\% = 85,07 \%$$

Berdasarkan data diatas diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah sebesar 85,07 % atau setara dengan persentase sebesar 119,82 % dari target sebesar 71 %.

Gambar 8 Pelaksanaan Kegiatan Supervisi / Verifikasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026 di Stasiun PPMHKP Banda Aceh



2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025 terdapat perbedaan pada unsur unsur indikator kinerja ini, dimana pada periode sebelumnya secara terpisah diperhitungkan nilai penerapan pada masing-masing sistem manajemen mutu, sehingga indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh merupakan indikator kinerja baru.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan adalah sama besarnya yaitu 71 % dan capaian sebesar 85,07 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah diupayakan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan mengikuti pelaksanaan verifikasi dan berkoordinasi dengan Pusat Manajemen Mutu dan Komite Akreditasi Nasional.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2026, indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh didukung dengan kegiatann Manajemen Mutu dengan pagu anggaran terbaru yaitu sebesar Rp. 40.850.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 9,55 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah dengan pelaksanaan program dan rencana

kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat BPPMHKP, serta Komite Akreditasi Nasional.

5. IK 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh diukur setiap semester atau dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berikut tangkap layar nilai IP ASN dari data <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> yang telah terintegrasi dengan data digital My ASN BKN pada halaman <https://asndigital.bkn.go.id/>.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2026 triwulan I indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh belum dilakukan perhitungan capaian karena menggunakan periode semester.

Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Indeks	82,36	83,45	89,89	91,94	88	-	-	-	-	82,50	-	82,50	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data pada ropeg.kkp.go.id capaian dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh belum dapat dilakukan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra terbaru, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai nilai target yang sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya. Terdapat upaya partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan bimbingan teknis, seminar, pelatihan atau diklat dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh pusat BPPMHKP maupun instansi lain yang terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal terkait pengelolaan kepegawaian yang secara umum mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pembaharuan atau peremajaan secara berkelanjutan.

6. IK 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona integritas (bobot 30%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada periode tahun 2026 seluruh komponen di Stasiun PPMHKP Banda Aceh tetap berusaha menjaga konsistensi dan melakukan pembaharuan pemenuhan seluruh data dukung dokumen pembangunan zona integritas secara berkala sesuai ketentuan. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 triwulan I belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan periode tahunan.

Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	77	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2026 indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan nama sesuai dengan nomenklatur sebelumnya, mempunyai kaitan dengan unsur-unsur penilaian yang lebih banyak dibandingkan dengan indikator kinerja periode sebelumnya yaitu Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas, sehingga tidak dapat diperhitungkan secara langsung.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 adalah dengan target nilai sebesar 77.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan integritas, peningkatan layanan, peningkatan kinerja serta penciptaan inovasi. Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan yang berlaku terus dilakukan pembaharuan oleh seluruh tim.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, salah satunya dengan penggunaan teknologi dalam pemenuhan dokumen serta untuk mengikuti pelatihan pelatihan terkait.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh secara umum didukung oleh anggaran yang terdapat di kelompok dukungan manajemen.,

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya lingkup UPT setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu memenuhi seluruh unsur penilaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh memiliki beberapa unsur

yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerja KKP. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Nilai	87,40	-	-	85,50	89,35	-	-	-	-	86,20	-	86,20	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2026 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dengan nama sesuai dengan nomenklatur sebelumnya Stasiun KIPM Aceh belum dapat diperbandingkan karena menggunakan periode perhitungan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Pada tahun 2026 indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh sama

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun *online*.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait

SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal dan kegiatan arsip.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran terkait dukungan manajemen yang mendukung indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh sebagian mengalami revisi blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP Stasiun PPMHKP Banda Aceh.

8. IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

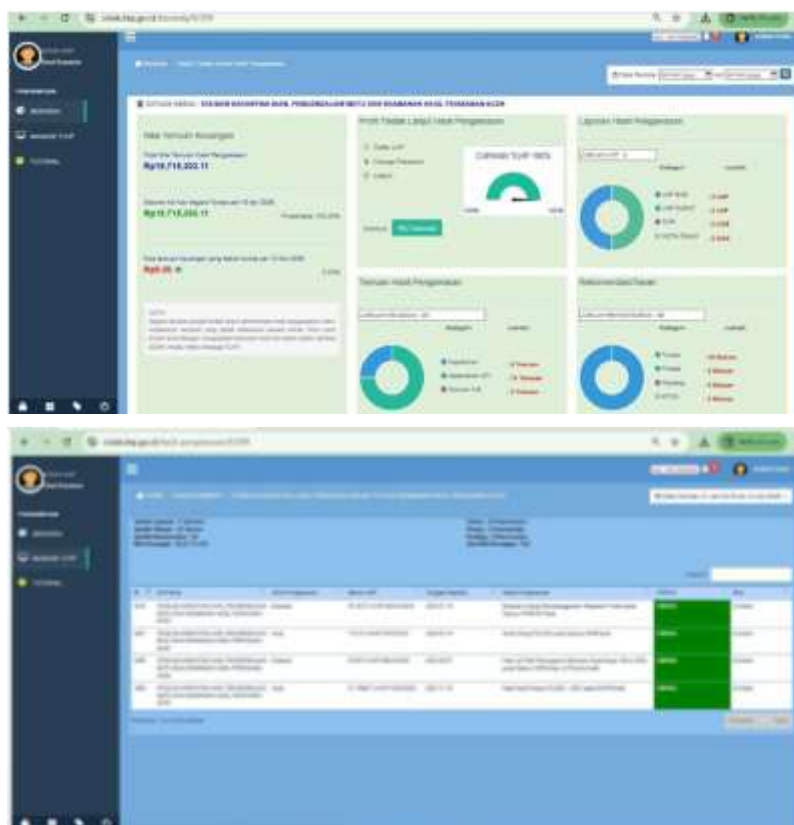
Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP secara otomatis. Berikut komponen perhitungan unsur serta tampilan gambar aplikasi SIDAK KKP tahun 2026 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh pada tahun 2026 triwulan I diperoleh sebesar 100 %. Sampai dengan akhir tahun 2026 triwulan I, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus “SUKSES” dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 85 %, Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tampilan tangkap layar aplikasi SIDAK tahun 2026 ditampilkan sebagai berikut.

Gambar 9 Capture Aplikasi Sidak KKP Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 Triwulan I



Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / %	100	100	100	100	100	-	86	100	116,28	86	116,28	86	116,28

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026, Stasiun PPMHKP Banda Aceh mencatat capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 86%. Jika dibandingkan dengan capaian pada akhir tahun dan nomenklatur sebelumnya, yang diperoleh dari tangkapan layar portal SIDAK, nilai capaian tetap berada pada angka 100%, yang menunjukkan kondisi bahwa Stasiun PPMHKP Banda Aceh terus berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 sama jika dibandingkan dengan dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal.

6. Realisasi Anggaran

Secara umum terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, telah berhasil dicapai oleh Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi namun mengalami blokir anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah berhasil dicapai oleh Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi Inpektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan.

9. IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu

pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Hal-hal penting dalam perhitungan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	
		25

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekwensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekwensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - ✓ Semakin rendah frekwensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
 - ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan, khusus triwulan 1 batas pemutakhiran adalah 10 hari kerja bulan Februari
 - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20 %
 - ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
4. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5 %
 - ✓ Dispensi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM yang disampaikan ke KPPN dan telag diterbitkan SP2D nya pada triwulan IIV
 - ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

Tabel 11 Target dan Realisasi Realisasi I K 9 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Nilai	97,02	96,17	97,47	98,41	98,99	-	-	-	-	92,10	-	92,10	-

1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2025 capaian indikator kinerja mengalami kenaikan menjadi sebesar 98,99, namun pada tahun 2026 triwulan I belum dapat diperbandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh mempunyai nilai Nilai target yang sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian Indikator Kinerja telah dilakukan upaya seluruh tim di Stasiun PPMHKP Banda Aceh untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal (perencanaan dan penganggaran).

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan Stasiun PPMHKP Banda Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

10. IK 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2026 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Sedangkan secara manual formula perhitungan indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tampilan dibawah ini :

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2026 triwulan I indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran belum dilakukan penilaian. Nilai kinerja diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu yang telah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Secara sistematis perhitungan nilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah diperhitungkan berdasarkan aplikasi SMART atau Monev Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id/user>).

Tabel 12 Target dan Realisasi IK 10 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Nilai	-	-	-	92,50	100	-	-	-	-	71,75	-	71,75	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh memperoleh capaian nilai sebesar 100.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh pada tahun 2026 sama dengan dengan Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Pada tahun 2026 analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal terkait layanan perencanaan.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan Stasiun PPMHKP Banda Aceh untuk meningkatkan nilai NKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

11. IK 11 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100 \%$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut :

- Hasil monitoring sementara realisasi penginputan data RUP Aceh telah sesuai dengan kebijakan pencatatan RUP 2026, Dimana pagu pengadaan barang/jasa sama nilainya dengan pagu RUP yang telah diumumkan.
- Melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal (Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026, perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian

Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026.

- Data perhitungan triwulan I, diperoleh informasi bahwa Unit Eselon I BPPMHKP telah lengkap/sesuai dalam mengumumkan pengadaan / belanja PBJ pada SIRUP atau sebesar 100 %.
- Berikut perhitungan dan tangkap layar nilai capaian Stasiun PPMHKP Banda Aceh mengacu pada daftar tabel UPT BPPMHKP dengan nomor urut 20 sebagai berikut :

$$\% \text{ RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ RUP PBJ} = \frac{1.094.470.000}{1.094.470.000} \times 100 \%$$

$$\% \text{ RUP PBJ} = 100 \%$$

Gambar 10 Tangkap Layar Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Sampai Dengan Tahun 2026 Triwulan I

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMHKP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Pada tahun 2026 indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh mempunyai target sebesar 77 %. Indikator ini memiliki periode pelaporan secara triwulanan dan jenis perhitungan data akumulasi akhir.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / %	-	-	-	-	100	-	77	100	120	77	120	77	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 tercapai 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah sebesar 87. Capaian dengan target pada Renstra adalah sama besarnya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatora

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, Stasiun PPMHKP Banda Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai capaian indikator ini dengan melakukan koordinasi dengan tim Internal, PBJ Aceh, BPPMHKP Pusat dan LKPP.

12. IK 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan

Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Berikut formula yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM unit pelayanan x 25

Stasiun PPMHKP Banda Aceh Mempergunakan Data Nilai Capaian Perolehan Survei Kepuasan Masyarakat Yang Ada Di <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> dan melakukan konversi ke dalam indeks. Selain itu berdasarkan surat Berdasarkan surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B. 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026, perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Banda Aceh memperoleh nilai SKM yaitu sebesar 98,15 (nomor urut 13. dalam tabel) Berikut perhitungan capaian IKM SKM Aceh tahun 2026 adalah sebagai berikut :

$$IKM = \frac{98,15}{25} \qquad IKM = 3,93$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2026 ini, Stasiun PPMHKP Banda Aceh melakukan kembali pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden Stasiun PPMHKP Banda Aceh triwulan I terhadap responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan Stasiun PPMHKP Banda Aceh, diperoleh hasil skor survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 98,15 (indeks sebesar 3,93). Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Stasiun PPMHKP Banda Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Hasil pelaksanaan SKM telah dipublikasikan kepada publik melalui *social media*.

Gambar 11 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026 Triwulan I



Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12 Tahun 2026 Triwulan I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2026						Renstra 2025 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh / Indeks	-	-	-	-	3,85	-	3,50	3,93	112,29	3,50	112,29	3,50	112,29

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan nilai SKM tahun 2025 terkait capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh sebesar 3,85.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator Indeks Kinerja Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh mempunyai nilai yang sama.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh telah melebihi target yang ditetapkan. Stasiun PPMHKP Banda Aceh berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 didukung melalui seluruh kegiatan terkait pelayanan dan teknis kepada pengguna jasa.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat internal petugas pelsosialisasi kepada pengguna jasa terkait sistem, produk dan spesifikasi jenis layanan; publikasi prosedur layanan dan prosedur persyaratan melalui media cetak (*banner*, brosur, dll) dan media elektronik / media sosial.

3.2. Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2026 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2026 berdasarkan data RKAKL dengan pagu awal adalah sebesar Rp. 5.063.790.000,- hingga pagu efektif terbaru berdasarkan revisi per Maret 2026 adalah sebesar Rp. 4.632.211.000,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan Stasiun PPMHKP Banda Aceh pada tahun 2026 hingga akhir bulan Maret terserap sebesar 25,82 %, dengan nilai Rp. 1.195.941.435,-. Pencapaian atau realisasi ini adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di Stasiun PPMHKP Banda Aceh.

Sampai dengan periode akhir tahun 2026 triwulan I terdapat perubahan pagu anggaran untuk efisiensi anggaran. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, Stasiun PPMHKP Banda Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu Stasiun PPMHKP Banda Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

3.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan Maret tahun 2026 sebanyak 16 orang PNS, 5 orang PPPK; 2 orang PPPK Paruh Waktu dan tenaga lainnya. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP. Berikut data jumlah pegawai di Stasiun PPMHKP Banda Aceh.

Tabel 15 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2026

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh)	1 Orang
2	Ketua Tim Kerja	
	a. Dukungan Manajemen / Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1 Orang
	b. Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	c. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	d. Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
3	Fungsional Tertentu :	
	a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2 Orang
	b. Asisten Inspektur Mutu	3 Orang
	c. Pranata Komputer	1 Orang
4	Fungsional Umum	
	a. Analis Mutu Hasil Perikanan	3 Orang
	b. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian	1 Orang
	c. Pranata Keuangan APBN	1 Orang
5	PPPK	5 Orang
6	PPPK Paruh Waktu	2 Orang
7	Tenaga Lainnya	5 Orang
Total		28 Orang

Tabel Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister (S2)	5 Orang
2	Sarjana / Diploma IV (S1/DIV)	7 Orang
3	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4	SLTA / Sederajat	1 Orang

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja di Stasiun PPMHKP Banda Aceh dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerjajaku Stasiun PPMHKP Banda Aceh. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Maret Tahun 2026 adalah sebesar 112,67 (kategori : istimewa), dengan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja tercapai melebihi target (persentase 120 %) dan 1 (satu) indikator kinerja melebihi target (persentase lebih 100 %) , serta dan 1 (satu) indikator kinerja belum memenuhi target (persentase kurang dari 100 %). Telah dilakukan upaya dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh dapat terus meningkat di masa yang akan datang dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2026 telah tercapai. Tantangan yang dihadapi Stasiun PPMHKP Banda Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan, serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dimana BPPMHKP menjadi Otoritas Kompeten terhadap pemenuhan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Banda Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pemantapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder baik internal Stasiun PPMHKP Banda Aceh, BPPMHKP, UPT KKP, maupun eksternal (pengguna jasa, penyuluh perikanan, Pemerintah Aceh, Bea Cukai, BKHIT, dan lain lain), guna memperoleh hasil maksimal dalam pengawasan dan pengendalian mutu primer. Perlunya peningkatan kapasitas personil inspektur mutu dan sosialisasi prosedur sertifikasi kepada pelaku usaha baik melalui tatap muka langsung ataupun melalui kontak telepon atau *whatsapp*. Selain itu melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan seluruh kegiatan di Stasiun PPMHKP Banda Aceh agar lebih optimal.

Demikian laporan kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh tahun 2026 triwulan I ini dibuat, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Stasiun PPMHKP Banda Aceh pada masa yang akan datang.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Diky Agung Setiawan**

Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Banda Aceh



Ditandatangani
Secara Elektronik

Diky Agung Setiawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BANDA ACEH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	238.674.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	77.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.778.116.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Banda Aceh Tahun 2026		5.093.790.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Banda Aceh



Ditandatangani
Secara Elektronik

Diky Agung Setiawan